



**DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 55 TAHUN 2026

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, bahwa PPID Pelaksana wajib menyediakan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI DKI JAKARTA.
- KESATU** : Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari:
1. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi publik yang tersedia setiap saat;
 3. Informasi yang dikecualikan.
- KEDUA** : Daftar Informasi Publik (DIP) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi acuan untuk dilaksanakan oleh setiap Unit Kerja di Lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 10 Februari 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA



Elisabeth Ratu Rante Allo
ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP 197009241998032004

Tembusan:

1. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
3. Ketua Komisi Informasi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Bidang/Suku Dinas/UPT di Lingkungan Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian, Perdagangan
Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Provinsi DKI
Jakarta
Nomor : 55 Tahun 2026
Tanggal : 10 Februari 2026

A. INFORMASI PUBLIK YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Profil	a. Profil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah b. Struktur Organisasi c. Daftar Pejabat Struktural Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah d. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)
2.	Ringkasan Program dan Kegiatan	a. Ringkasan DPA DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta b. Penanggung Jawab Program c. Jadwal Pelaksanaan Program dan Kegiatan d. Indikator RKPD dan RPJMD e. Rencana Pengadaan Barang dan Jasa
3.	Rincian Kinerja	a. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta b. Rencana Strategis (Renstra) DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta c. Rencana Kerja (Renja) d. Indikator Kinerja Utama e. Perjanjian Kinerja
4.	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan yang telah diaudit
5.	Ringkasan Laporan Akses Pelayanan Informasi Publik	a. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang Diterima b. Waktu yang diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik c. Informasi tentang Hak dan Tata Cara Memperoleh Informasi Publik d. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik yang Ditindaklanjuti (Dikabulkan dan ditolak)
6.	Hak dan Tata Cara dalam Memperoleh Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, serta Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Informasi tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta
7.	Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran	a. Tata Cara Penanganan Pengaduan dari Masyarakat b. Tindak Lanjut terhadap Laporan Pengaduan Masyarakat
8.	Laporan Jakarta Entrepreneur	Laporan Data Mingguan Jakarta Entrepreneur

B. INFORMASI PUBLIK YANG TERSEDIA SETIAP SAAT

NO.	KELOMPOK INFORMASI	RINCIAN INFORMASI
1.	Daftar Informasi Publik (DIP)	Informasi Publik Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta yang Disediakan Melalui Website Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta
2.	Peraturan dan Keputusan	Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkup Tugas DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta
3.	Kepegawaian	a. Data Statistik Pegawai DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta b. Rekapitulasi Data Pegawai DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta
4.	Identitas Pembuat Aduan	a. Data Statistik Aduan Terhadap Layanan Publik di DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta b. Rekapitulasi Data Pembuat Aduan Terhadap Layanan Publik di DPPKUKM Provinsi DKI Jakarta
5.	Jumlah Pengunjung Website	Rekapitulasi Data Jumlah Pengunjung Website PPID Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta

C. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	KELOMPOK INFORMASI	ALASAN DIKECUALIKAN
1.	Data Pribadi Wajib Retribusi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Data Pribadi Pegawai Dinas PPKUKM	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3.	Data Rincian Kontrak Pegawai Dinas PPKUKM	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4.	Berita Acara dan Penjatuhan Hukuman Disiplin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5.	SK Kepegawaian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6.	Kartu Identitas Isteri/ Suami Sah dari Aparatur Sipil Negara, dan Kartu Identitas Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
7.	Data Keluarga Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
8.	Data Industri dan Data Kawasan Industri	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
9.	Data Penilaian Hasil Kurasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

NO.	KELOMPOK INFORMASI	ALASAN DIKECUALIKAN
10.	Data Pribadi Seseorang/ Badan Usaha Pelaku Usaha Ekspor Teregistrasi e-SKA	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
11.	Data Pribadi Seseorang/ Badan Usaha Pelaku Usaha Sektor Perdagangan Terdaftar OSS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
12.	Laporan Keuangan Koperasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
13.	Laporan Rapat Anggota Tahunan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
14.	Data Pribadi Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
15.	Data Pribadi Anggota Koperasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
16.	Simpanan Pribadi Anggota Koperasi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
17.	Dokumen Notulen/ Nota Dinas Hasil Rapat Internal Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta Termasuk Lampiran/ Bukti Dukung (Daftar Hadir, Foto, dan Lainnya)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
18.	Naskah Dinas dan Kelengkapan Pendukung Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
19.	Data Pribadi Peserta Jakarta Entrepreneur	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
20.	Data Pribadi Pedagang Kaki Lima	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
21.	Berita Acara Pengawasan (BAP) Beserta Lampiran	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
22.	Surat Peringatan/ Teguran	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
23.	Berita Acara Pemasangan Garis Pengamanan Barang	Pasal 17 huruf a, b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
24.	Berita Acara Pembuka Garis Pengamanan Barang	Pasal 17 huruf a, b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
25.	Berita Acara Klarifikasi	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
26.	Data Laporan Hasil Pengujian Produk Bahan dan Barang Teknik	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
27.	Rincian Data Identitas Pemohon/ Pendaftar Pengujian Produk Bahan dan Barang Teknik (Wajib Retribusi)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

NO.	KELOMPOK INFORMASI	ALASAN DIKECUALIKAN
28.	Rincian/ Dokumentasi Pemrograman Sistem Informasi Pengujian Produk Bahan dan Barang Teknik	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
29.	Data Laporan Hasil Pengujian Produk Kerajinan dan Tekstil	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
30.	Data Laporan Hasil Pengujian Alat UTTP	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
31.	Data Pribadi Penyewa atau Pengontrak yang Ditangani oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil, dan Menengah serta Permukiman Pulogadung (Sarana Kerja Hunian, Barak Kerja, Lahan, Ruang Pamer dan Gudang)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
32.	Data atau Informasi Terkait Kepemilikan Aset Tanah yang Dikelola oleh Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengembangan Usaha Kecil, dan Menengah Serta Permukiman Pulogadung (baik berupa Sertifikat Hak Pengelolaan, Sertifikat Hak Pakai dan Surat Pelepasan Hak)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
33.	Dokumen yang Berkaitan dengan Keuangan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
34.	Data Pribadi Calon Peserta Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
35.	Data Pribadi Peserta Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
36.	Data Pribadi Narasumber Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
37.	Data Informasi Detail Server (Spec) dan Lokasi Server	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI DKI JAKARTA



ELISABETH RATU RANTE ALLO
NIP 197009241998032004